

**KEBIJAKAN PEMBANGUNAN  
EKONOMI KELAUTAN INDONESIA: *QUO VADIS?***



**KEBIJAKAN PEMBANGUNAN  
EKONOMI KELAUTAN INDONESIA:  
*QUO VADIS?***

**Achmad Sani Alhusain  
Ariesy Tri Mauleny  
Nidya Waras Sayekti  
Lisnawati  
Masyithah Aulia Adhiem**

**Editor:  
Carunia Mulya Firdausy**

Yayasan Pustaka Obor Indonesia  
Jakarta, 2019

Judul:  
Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kelautan Indonesia:  
*Quo Vadis?*  
Carunia Mulya Firdausy (ed.)

xii + 184 hlm; 15,5 x 23 cm  
ISBN 978-602-433-845-9

Copyright ©2019  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
*All Rights Reserved*

Penerbitan ini dimungkinkan atas kerja sama  
Yayasan Pustaka Obor Indonesia dengan  
Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Dewan Perwakilan Rakyat  
Republik Indonesia

Cetakan pertama: Desember 2019  
YOI: 1744.38.1.2020  
Desain sampul: Masugeng

Yayasan Pustaka Obor Indonesia  
Jl. Plaju No. 10, Jakarta 10230, Indonesia  
T. + 62 (0)21 31926978, 31920114  
F. + 62 (0)21 31924488  
E-mail: [yayasan\\_obor@cbn.net.id](mailto:yayasan_obor@cbn.net.id)  
<http://www.obor.or.id>

# KATA PENGANTAR

*Dr. Indra Pahlevi*

Kepala Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Salam Sejahtera,

Kami memberikan apresiasi atas terbitnya buku yang berjudul *Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kelautan Indonesia: Quo Vadis?* yang disusun oleh peneliti bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Hasil analisis berupa gagasan dan pemikiran serta pengalaman empiris yang dituangkan dalam buku ini diharapkan dapat menjadi gambaran dan masukan dalam upaya memperbaiki, mengembangkan, menguatkan dan meredesain kebijakan pembangunan ekonomi kelautan di Indonesia. Pendekatan analisis dilakukan tidak hanya berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan namun juga berdasarkan *review* berbagai kajian terkait serta analisis empiris berdasarkan studi-studi sebelumnya.

Struktur buku terdiri atas 7 (tujuh) bagian buku yang memiliki keterkaitan yang baik untuk memperkaya pembahasan mengenai kebijakan pembangunan ekonomi kelautan dan pemberdayaan masyarakat nelayan di Indonesia dalam berbagai perspektif. Bagian pertama dan bagian terakhir tulisan merupakan prolog dan epilog yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari buku ini dan disusun oleh Prof. Carunia Mulya Firdausy, MADE, Ph.D., APU selaku editor buku ini.

Saya sampaikan apresiasi kepada masing-masing penulis yang terdiri dari Achmad Sani Alhusain, Ariesy Tri Mauleny, Nidya Waras Sayekti, Lisnawati dan Masyithah Aulia Adhiem. yang telah menghadirkan beragam pemikiran mengenai Pembangunan Ekonomi Kelautan Indonesia. Buku ini mengawali pembahasannya dengan memaparkan secara jelas mengenai ekonomi kelautan dan masyarakat nelayan nasional. Selanjutnya juga dijelaskan mengenai bagaimana permasalahan, perkembangan dan upaya meredesain pembangunan ekonomi kelautan Indonesia. Bagian penting lainnya adalah optimalisasi dan penguatan ekonomi kelautan Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat nelayan, upaya mengatasi *illegal, unrelated*, dan *unregulated fishing*. Pada bagian akhir ditutup dengan pembahasan mengenai Ekonomi Biru sebagai alternatif kebijakan pengembangan ekonomi kelautan di Indonesia.

Saya sampaikan apresiasi kepada rekan-rekan peneliti dan terima kasih kepada Prof. Carunia Mulya Firdausy, MADE, Ph.D., APU yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya. Kepada penerbit disampaikan penghargaan atas kerja samanya dalam penerbitan bersama dengan Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR-RI. Besar harapan saya, buku ini akan bermanfaat, bukan saja dalam perumusan rancangan undang-undang khususnya namun juga dalam perumusan kebijakan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.

Jakarta, September 2019

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	xi
Daftar Tabel	xii

## BAGIAN KESATU

### PROLOG: KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN INDONESIA: *QUO VADIS?*

<i>Carunia Mulya Firdausy</i>	1
I.    Pendahuluan	
II.   Mengapa Update Kebijakan Kelautan dan Perikanan Mutlak Perlu?	4
III.  Sistimatikan dan Uraian Isi Buku	7

## BAGIAN KEDUA

### KEBIJAKAN KELAUTAN DAN MASYARAKAT NELAYAN NASIONAL

<i>Achmad Sani Alhusain</i>	13
I.    Pendahuluan	15
II.   Potensi Laut Nusantara	18
III.  Kebijakan Kelautan Nasional	21
IV.  Masalah Kebijakan Kelautan bagi Masyarakat Nelayan Nasional	28
V.    Penutup	36

## BAGIAN KETIGA

### REDESAIN PEMBANGUNAN EKONOMI KELAUTAN INDONESIA

<i>Ariesy Tri Mauleny</i>	41
I. Pendahuluan	43
II. Ekonomi Kelautan Indonesia	46
A. Konsepsi Ekonomi Kelautan	46
B. Potensi, Tantangan, dan Permasalahan Ekonomi Kelautan	48
C. Operasionalisasi Ekonomi Kelautan Indonesia	52
III. Perkembangan Pembangunan Ekonomi Kelautan	55
A. Perkembangan Kebijakan dan Program Ekonomi Kelautan	55
B. Perkembangan Penerimaan Ekonomi Kelautan	58
C. Perkembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kelautan	66
IV. Redesain Pembangunan Ekonomi Kelautan	69
V. Penutup	78

## BAGIAN KEEMPAT

### PERMASALAHAN EKONOMI NELAYAN DAN UPAYA PEMBERDAYAANNYA

<i>Nidya Waras Sayekti</i>	85
I. Pendahuluan	87
II. Definisi, Karakteristik, dan Tipologi Nelayan	89



III. Kehidupan Sosial Ekonomi Nelayan dan Permasalahannya	35
IV. Kebijakan Pemerintah untuk Nelayan	96
V. Pemberdayaan Ekonomi Nelayan	101
VI. Penutup	102

## BAGIAN KELIMA

### KEBIJAKAN PEMBERANTASAN ILLEGAL, UNREPORTED, UNREGULATED (IUU) FISHING DI INDONESIA

<i>Lisnawati</i>	107
I. Pendahuluan	109
II. Kerangka Teori	112
A. Pengertian <i>Illegal, Unreported, Unregulated Fishing</i>	112
B. Pelanggaran <i>IUU Fishing</i>	113
III. Kebijakan dalam Pemberantasan IUU Fishing	115
A. Kebijakan Pemerintah	115
B. Strategi Penanggulangan <i>IUU Fishing</i>	123
IV. Penutup	126

## BAGIAN KEENAM

### EKONOMI BIRU SEBAGAI ALTERNATIF KEBIJAKAN EKONOMI KELAUTAN DI INDONESIA

<i>Masyithah Aulia Adhiem</i>	131
I. Pendahuluan	133
II. Perkembangan Sektor Kelautan Indonesia	135
A. Kontribusi dan Kebijakan Ekonomi Kelautan Indonesia	135
B. Tantangan Sektor Kelautan Indonesia	139
III. Perkembangan Konsep Ekonomi Berkelanjutan	142

A.	Ekonomi Hijau dan Ekonomi Sirkular	142
B.	Ekonomi Biru	145
IV.	Ekonomi Biru Sebagai Alternatif Pengembangan Ekonomi Kelautan di Indonesia	150
A.	Upaya Penerapan Kebijakan Ekonomi Biru di Indonesia	150
B.	Tantangan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Biru	155
V.	Penutup	157

## BAGIAN KETUJUH

### EPILOG: ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN MENDATANG: BEBERAPA PEMIKIRAN *Carunia Mulya Firdausy*

		163
I.	Pendahuluan	165
II.	Kebijakan Kelautan dan Masyarakat Nelayan	165
III.	Redesain Pembangunan Ekonomi Kelautan	167
IV.	Permasalahan Ekonomi Nelayan dan Upaya Pemberdayaannya	168
V.	Kebijakan Pemberantasan <i>Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing</i>	169
VI.	Ekonomi Biru Sebagai Alternatif Kebijakan Ekonomi Kelautan	170

Indeks	173
Tentang Editor	179
Tentang Penulis	181

## DAFTAR GAMBAR

### BAGIAN KETIGA

#### REDESAIN PEMBANGUNAN EKONOMI KELAUTAN INDONESIA

- Gambar 1. Produksi Perikanan Laut Berdasarkan Pulau (2007 s.d. 2017) 61
- Gambar 2. Jumlah Perusahaan Penangkapan Ikan Menurut Status Permodalan 63

### BAGIAN KELIMA

#### KEBIJAKAN PEMBERANTASAN *ILLEGAL, UNREPORTED, UNREGULATED* (IUU) *FISHING* DI INDONESIA

- Gambar 1. Jumlah Penjatuhan Sanksi dan Jenis Sanksi Administratif Kejahatan Perikanan 117

## DAFTAR TABEL

### BAGIAN KETIGA

#### REDESAIN PEMBANGUNAN EKONOMI KELAUTAN INDONESIA

Tabel 1.	Produksi Perikanan Laut yang Dijual Berdasarkan Provinsi	59
Tabel 2.	PDB Kelautan dan Perikanan Atas Dasar Harga Berlaku 2010	64
Tabel 3.	Jumlah Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan	69

### BAGIAN KEENAM

#### EKONOMI BIRU SEBAGAI ALTERNATIF KEBIJAKAN EKONOMI KELAUTAN DI INDONESIA

Tabel 1.	Volume dan Nilai Produksi Perikanan Tahun 2017	137
----------	--	-----

BAGIAN KESATU

**PROLOG: KEBIJAKAN PEMBANGUNAN  
KELAUTAN DAN PERIKANAN  
INDONESIA: *QUO VADIS?***

*Carunia Mulya Firdausy\**

---

\* Penulis adalah Profesor Riset Bidang Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Tarumanagara (UNTAR).



# I. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi nasional dalam periode 2019-2024 masih akan tetap “dihantui’ oleh pertumbuhan ekonomi yang melambat seperti periode 2014-2019. Penyebabnya selain karena ketidakpastian, risiko, dan dinamika perekonomian global yang semakin sarat dengan persaingan dan perubahan teknologi yang mengikuti kecepatan pertumbuhan deret ukur maupun “ego-centris’ berbagai negara untuk memikirkan kepentingannya sendiri melalui berbagai kebijakan proteksi, juga salah satunya karena paradigma berpikir yang umumnya digunakan dalam penetapan kebijakan ekonomi nasional belum berubah (*business as usual*).

Kebijakan yang seharusnya menekankan prinsip-prinsip ilmu ekonomi yang mengedepankan pada pencapaian kemajuan ekonomi dengan cara mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas (*limited resources*) untuk mencapai kebutuhan yang tidak terbatas (*unlimited wants and needs*) belum dioptimalkan (Acemoglu *et.al.*, 2015). Hal ini dapat diperhatikan dari masih banyaknya rumusan kebijakan yang hanya didasarkan pada pikiran dan konsep pemecahan atau pengobatan (*cure*) dan melupakan pikiran dan konsep pencegahan (*prevention*). Lebih parah lagi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang dirumuskan tersebut juga kering tanpa diikuti kata-kata kunci seperti integrasi, sinergi, koordinasi, multidisiplin, interdisiplin, empirik dan seterusnya.

Mengutip pentingnya penetapan kebijakan yang harus didasarkan pada kata kunci empirik ini *The Committee for the Prize in Economics Sciences in Memory of Alfred Nobel (2019)* dalam penganugerahan *Economics Noble* kepada Abhijit Banerjee, Esther Duflo dan Michael Kremer menyatakan sebagai berikut.

*“A well articulated theory may be crucial to discovering possible mechanism behind poverty and to guiding the search for effective ways to combat it. But it is not sufficient to guide policy. While theory can*

*pinpoint certain incentives, it does not tell us how powerful these are in practice”*

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan juga tak luput dari berbagai kelemahan yang diungkapkan di atas. Berbagai indikator dari belum optimalnya *output, impact, and performance* dari penetapan kebijakan kelautan dan perikanan selama ini dapat diperhatikan dari masih banyak dan belum terurainya persoalan yang menyangkut seperti *underfishing, over fishing*, kemiskinan dan pengangguran nelayan, infrastruktur, gizi, teknologi dan seterusnya. Sebagian dari kita pasti akan bereaksi untuk mengatakan bahwa catatan belum optimalnya *output, impact, and performance* dari kebijakan-kebijakan yang ada tersebut lebih disebabkan persoalan waktu, kompleksitas dan tidak sederhananya masalah kelautan dan perikanan sehingga perlu jangka waktu panjang dalam memecahkannya.

Argumen pembelaan terhadap catatan belum optimalnya kebijakan kelautan dan perikanan selama ini yang dikaitkan dengan waktu di atas tentu sah-sah saja. Namun pembelaan tersebut tidak boleh mengunci dan apalagi mengatakan kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan dan dilakukan tersebut merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi sehingga tetap harus dilakukan bagi keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan nasional ke depan. Keterbukaan untuk memahami bahwa *today's problems cannot be solved by yesterday's solutions semestinya* merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam penetapan kebijakan kelautan dan perikanan kini dan ke depan. Mengapa demikian?

## **II. Mengapa *Update* Kebijakan Kelautan dan Perikanan Mutlak Perlu?**

Sudah bukan merupakan rahasia lagi bahwa Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki potensi kekayaan



kelautan dan perikanan yang besar. Potensi kekayaan kelautan dan perikanan tersebut terbentang seluas 5,8 juta km<sup>2</sup> dengan garis pantai terpanjang ke empat di dunia sepanjang 95 ribu km serta dikelilingi lebih dari 17 ribu pulau dari Sabang sampai Merauke.<sup>1</sup> Indonesia juga berada pada posisi strategis di antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia serta dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Posisi ini bukan hanya menempatkan Indonesia sebagai persimpangan lalu lintas dan poros maritim dunia tetapi juga titik persilangan perekonomian dunia dan perdagangan internasional. Potensi kekayaan ini menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga negara terbesar dunia dalam produksi perikanan di bawah Cina dan India.

Namun besarnya potensi kekayaan ekonomi kelautan Indonesia, dan tingginya harapan menjadi poros maritim dunia tersebut belum diikuti dengan upaya strategis dan langkah sinergis, sehingga potensi yang ada belum termanfaatkan secara optimal. Potensi perikanan tangkap yang diperkirakan mencapai 6,26 juta ton per tahun dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 5.007 juta ton atau 80% dari MSY (*Maximum Sustainable Yield*) hingga saat ini kemampuan jumlah tangkapannya baru sebatas lebih kurang mencapai 3,5 juta ton sehingga tersisa peluang sebesar 1,5 ton/tahun. Padahal jika seluruh potensi perikanan tangkap tersebut dimanfaatkan, diperkirakan diperoleh nilai ekonomi sebesar US\$15,1 miliar.

Demikian pula dengan potensi budidaya laut yang terdiri dari potensi budidaya ikan, udang, moluska dan budidaya rumput laut yang diperkirakan sebesar 46,73 juta ton per tahun maupun potensi bioteknologi kelautan untuk mengembangkan industri bioteknologi kelautan seperti industri bahan baku untuk makanan, industri bahan pakan alami, benih ikan dan udang, industri bahan pangan. Nilai

---

1 "Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN): Masalah Kelautan Jangan Dilihat Sebelah Mata", <http://bumn.go.id/perikananindonesia/berita/82/Dewan.Kelautan.Indonesia.DEKIN.:Masalah.Kelautan.Jangan.Dilihat.Sebelah.Mata>, diakses 10 September 2019.

ekonomi dari potensi bioteknologi kelautan tersebut diperkirakan mencapai US\$ 40 miliar. Belum lagi bicara, potensi hutan mangrove, terumbu karang sepanjang 17.500 km, serta rawa nipa dan rawa pasang surut di sekitar muara delta sungai, dan potensi ekonomi pesisir dan seterusnya. Kesemuanya merupakan lingkungan bagi biota laut dengan *standing crop* populasi ikan yang tinggi serta tempat habitat fauna, yang berkembang ke jurusan laut dan darat, yang merupakan sumber bahan pangan, minuman, bahan bangunan, energi dan lain-lain.

Jika seluruh potensi ekonomi kelautan dan perikanan Indonesia tersebut dimanfaatkan secara optimal diperkirakan pendapatan yang diperoleh bernilai sebesar US1.338 triliun per tahun. Nilai tersebut lima kali lipat nilai APBN 2019 atau 1,3 Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional saat ini. Selain itu, jika potensi ekonomi kelautan dan perikanan tersebut digarap secara serius, akan dapat menciptakan 45 juta lapangan kerja atau 40 persen dari total Angkatan kerja Indonesia.

Sampai dengan tahun 2019, sektor kelautan hanya mampu menyumbang di bawah 30 persen PDB. Bahkan sektor perikanan hanya menyumbang 3 persen. Sementara Jepang, Korea Selatan dan Tiongkok yang memiliki potensi kelautan dan perikanan yang relatif kecil, kontribusinya mampu mencapai 48,5 persen PDB. Bahkan Vietnam 57,63 persen dan sebagian negara Eropa mencapai 60 persen dari PDB.<sup>2</sup>

Membaca data dan fakta di atas, selain persoalan yang menyangkut beragam tantangan, kendala dan keterbatasan serta permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan potensi kekayaan kelautan dan perikanan untuk pembangunan ekonomi nasional, pilihan kebijakan yang ditetapkan diyakini atau paling tidak berkontribusi terhadap rendahnya capaian kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan pada pembangunan ekonomi nasional selama ini. Oleh

---

2 "Di Laut Kita Kaya", <https://www.indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/di-laut-kita-kaya>, diakses 20 September 2019.

karena itu, perbaikan untuk mengkinikan (*updating*) kebijakan ekonomi kelautan dan perikanan tidak dapat dihindari. Apalagi Indonesia memiliki semangat dan mimpi untuk menjadi 5 besar negara maju di dunia dengan PDB sebesar US\$ 7 triliun atau pendapatan per kapita sebesar Rp 320 juta/per kapita per tahun atau Rp27 juta per kapita per bulan dengan kemiskinan mendekati nol persen pada tahun 2045. Semua itu tidak datang otomatis, tidak datang dengan mudah. Harus disertai kerja keras, dan kita harus kerja cepat, harus disertai kerja-kerja bangsa yang produktif sebagaimana diungkapkan oleh Presiden Jokowi dalam pidatonya pada sidang Paripurna MPR RI dalam rangka Pelantikannya sebagai Presiden RI terpilih 2019-2024. Catatan-catatan inilah yang menjadi latar belakang pentingnya pembahasan menyangkut kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan ditulis dalam buku ini.

### **III. Sistimatikan dan Uraian Isi Buku**

Buku ini terdiri dari 7 Bagian. Sistimatika isi buku diawali dengan pengantar latar belakang signifikannya pembahasan terkait perbaikan untuk mengkinikan (*updating*) kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia (Bagian 1). Seperti diungkapkan di atas, perbaikan untuk mengkinikan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan bukan hanya terbatas karena alasan belum optimalnya capaian kebijakan yang ditetapkan dalam pencapaian tujuan pembangunan kelautan dan perikanan yang diharapkan selama ini, melainkan juga karena kondisi eksternal dan internal yang mendukung berhasilnya kebijakan tersebut semakin tidak menentu, berisiko, dinamis, dan kompleks. Dengan demikian mutlak diperlukan perbaikan (*improvement*) dalam kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan kini dan ke depan.

Namun perlu dicatat dalam mengungkapkan usulan perbaikan (*improvement*) kebijakan-kebijakan tersebut, pembahasan buku ini lebih menitik beratkan pada permasalahan aktual yang membutuhkan perhatian saja. Artinya, pembahasan detail terkait kebijakan untuk memecahkan persoalan hilir, hulu serta kombinasi keduanya maupun dalam proses pelaksanaan dan *output* yang dihasilkan dari kebijakan-kebijakan selama ini tidak diungkapkan dalam buku ini.

Bagian 2 memulai penjelasan bahwa pemerintah telah memiliki kebijakan pengelolaan sumber daya laut secara optimal dan lestari. Bahkan kebijakan ini telah dilengkapi dengan program maupun kegiatannya. Kebijakan kelautan tersebut telah diundangkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Bahkan rencana aksi dari undang-undang ini telah tertuang dalam Peraturan Presiden No. 16 tahun 2017. Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia dijabarkan ke dalam 5 (lima) klaster program prioritas, yaitu: (1) Batas Maritim, Ruang Laut, dan Diplomasi Maritim; (2) Industri Maritim dan Konektivitas Laut; (3) Industri Sumber Daya Alam dan Jasa Kelautan serta Pengelolaan Lingkungan Laut; (4) Pertahanan dan Keamanan Laut; dan (5) Budaya Bahari. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga sudah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk peraturan larangan penggunaan cantrang yang diatur dalam Peraturan Menteri No. 02/PERMEN-KP/2015 tentang Pelarangan Penggunaan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Net*).

Dari uraian kebijakan-kebijakan tersebut, kemudian diuraikan masalah dan implikasi serta dampak positif dan negatif dari kebijakan tersebut baik dalam pelaksanaan kebijakan itu sendiri maupun terhadap nelayan. Akhirnya, solusi agar kebijakan yang telah ditetapkan dan dilakukan dapat berjalan optimal diberikan pada bagian penutup bagian ini.

Bagian 3 mendiskusikan tentang pentingnya redesain dan revitalisasi pembangunan ekonomi kelautan. Dalam bagian ini argumen utama yang mendasari pentingnya redesain dan revitalisasi

kebijakan pembangunan ekonomi yakni karena besarnya potensi ekonomi kelautan dan tingginya harapan Indonesia menjadi poros maritim dunia, namun belum diikuti dengan upaya strategis dan langkah sinergis. Akibatnya, potensi yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal. Juga diungkapkan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan baru sebatas upaya mewujudkan keamanan dan kedaulatan yang belum sepenuhnya terwujud. Oleh karena itu, upaya mengatasi akar masalah pembangunan ekonomi dan konservasi sumber daya kelautan, seharusnya dapat lebih dioptimalkan. Perhatian terhadap kebijakan juga perlu diberikan dalam kaitannya dengan pembangunan kawasan di sekitar pelabuhan yang belum sepenuhnya tergali dan dimanfaatkan potensi ekonominya maupun perdagangan antar pulau maupun antarwilayah serta pembangunan tol laut yang belum diikuti dengan penyebaran industri dan penguatan aktivitas ekonominya.

Singkatnya, Bagian 3 ini dimaksudkan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meredesain kebijakan pengembangan potensi kelautan sebagai basis perekonomian nasional. Bagaimana menghadirkan pembangunan ekonomi kelautan sehingga upaya menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dapat terwujud. Pembahasan dalam bagian ini dimulai dari bagaimana membangun konsepsi tentang ekonomi kelautan, kemudian diikuti pengungkapan perkembangan kebijakan dan penerimaan ekonomi kelautan, termasuk pembangunan sumber daya manusia ekonomi kelautan dan permasalahan yang berkembang. Dengan begitu, redesain pembangunan ekonomi kelautan dapat lebih komprehensif dihadirkan.

Kemudian Bagian 4 mendiskusikan permasalahan ekonomi nelayan dan upaya pemberdayaannya. Latar belakang pentingnya pembahasan hal ini karena adanya fakta dan data bahwa meskipun secara makro ekonomi terjadi peningkatan volume produksi, nilai ekspor, dan sumbangan bidang kelautan terhadap PDB, namun

kondisi sebagian besar (sekitar 70 persen) nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir masih terjebak dalam kemiskinan. Dengan kata lain, pembangunan kelautan menghasilkan ekonomi dualistik, sebagian masyarakat bahari masih miskin dan hanya sebagian kecil yang makmur. Berbagai peraturan perundangan di sektor kelautan telah dibuat pemerintah, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Walaupun demikian, masih terdapat permasalahan di sektor kelautan Indonesia antara lain rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan. Atas dasar inilah dilakukan analisis dan evaluasi atas kebijakan kelautan dan perikanan Indonesia.

Bagian 5 menguraikan dan membahas tentang kebijakan pemberantasan *Illegal, Unreported dan Unregulated Fishing (IUU)* di Indonesia. Seperti bagian-bagian sebelumnya diungkapkan bahwa praktek IUU *fishing* diakibatkan oleh melimpahnya ikan-ikan yang ada di perairan Indonesia. Ikan-ikan yang berada di Indonesia semestinya memberikan keuntungan yang besar bagi masyarakat Indonesia. Namun disayangkan bahwa banyak ikan yang dicuri oleh negara-negara lain. Berdasarkan latar belakang tersebut, penting didiskusikan bagaimana peran pemerintah dalam menanggulangi hal tersebut sehingga diharapkan ke depannya kegiatan *illegal fishing* dapat diminimalisasi.

Bagian 6 mengangkat pentingnya konsep Ekonomi Biru sebagai alternatif kebijakan ekonomi kelautan di Indonesia. Argumentasi pentingnya konsep Ekonomi Biru ini didasarkan pada alasan bahwa Ekonomi Hijau, termasuk di dalamnya Ekonomi Sirkular, yang diharapkan mampu meningkatkan PDB, namun pada kenyataannya konsep tersebut sulit untuk diterapkan secara masif dikarenakan adanya kebutuhan penggunaan teknologi modern yang membutuhkan biaya tinggi dan permasalahan sosial-ekonomi lainnya. Oleh karena itu, Ekonomi Biru menjadi salah satu upaya yang dapat dikembangkan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Apalagi konsep Ekonomi Biru ini menitikberatkan pada dua aspek yaitu keberlanjutan

(*sustainability*) dan pelibatan masyarakat (*inclusiveness*). Dengan demikian, konsep Ekonomi Biru dapat melibatkan banyak usaha kecil sektor kelautan dan perikanan sehingga mampu meningkatkan pendapatan nelayan/petani ikan, membuka lapangan kerja dan selanjutnya dapat menggerakkan perekonomian nasional.

Dari uraian dan pembahasan enam bagian di atas, akhirnya diberikan kesimpulan dan catatan penting yang perlu diperhatikan dalam perbaikan dalam kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan terkait topik-topik tersebut dalam Bagian 7. Catatan-catatan kesimpulan dan masukan tersebut diharapkan dapat menjadi perhatian pembuat dan perencana kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan kini dan ke depan. Hal ini bukan saja karena berbagai pikiran yang diungkapkan dan dianalisis di masing-masing bagian didasarkan pada pikiran dan konsep semata, tetapi juga karena atas dasar temuan empirik penelitian lapangan Provinsi Banten, Jawa Tengah dan Jawa Barat serta kajian studi yang diungkapkan dalam literatur maupun sumber *web-search* lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, D., D. Laibson, dan J.A. List, 2015. *Macroeconomics*, Pearson Education, USA.
- Anonymous, 2019. Pidato Presiden RI pada Sidang Paripurna MPR RI dalam rangka Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2019-2024.
- <http://bumn.go.id/perikananindonesia/berita/82/Dewan.Kelautan.Indonesia.DEKIN.:Masalah.Kelautan.Jangan.Dilihat.Sebelah.Mata>, diakses 10 September 2019.
- <https://www.indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/di-laut-kita-kaya>, diakses 20 September 2019.
- The Committee for the Prize in Economic Sciences in Mdemory of Alfred Nobel, 2019. *Understanding Development and Poverty Alleviation*, October 2019.



**BAGIAN KETUJUH**

**ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN  
KELAUTAN DAN PERIKANAN  
MENDATANG: BEBERAPA PEMIKIRAN**

*Carunia Mulya Firdausy\**

---

\* Penulis adalah Profesor Riset Bidang Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI) dan Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Tarumanagara (UNTAR).



# I. Pendahuluan

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan nasional kini dan ke depan perlu diperbaiki untuk disesuaikan dengan kekinian permasalahan dan dinamika serta ketidaktentuan perkembangan ekonomi global dan nasional saat ini dan mendatang. Berbagai penyesuaian kebijakan dimaksud tidak hanya terkait dengan kebijakan menyangkut persoalan hulu dan hilir dalam pembangunan kelautan dan perikanan saja, tetapi juga menyangkut kombinasi keduanya dan bahkan juga dapat disesuaikan dengan *output*, *impact* dan *performance* yang diharapkan dari kebijakan-kebijakan tersebut dalam berkontribusi pada perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Besarnya potensi kekayaan kelautan dan perikanan yang sampai saat ini pemanfaatannya masih terbatas dan belum optimal di satu pihak dan kondisi kehidupan nelayan dan petani ikan yang belum sejahtera di lain pihak perlu mendapat perhatian utama dalam penyesuaian kebijakan-kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan kini dan ke depan. Kebijakan-kebijakan tersebut juga harus memperhatikan kelestarian sumber daya agar keuntungan ekonomi yang diperoleh saat ini tidak merugikan kehidupan masyarakat dimasa datang. Berikut ini diberikan catatan kesimpulan dan masukan perbaikan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dari masing-masing bab.

## II. Kebijakan Kelautan dan Masyarakat Nelayan

Pelaksanaan pembangunan ekonomi kelautan di Indonesia tentu tak luput dari berbagai permasalahan yang timbul. Beberapa permasalahan tersebut antara lain: keterbatasan SDM, menurunnya

jumlah nelayan, *overfishing*, praktik-praktik illegal, *Unregulated and Unreported (IUU) Fishing*, baik oleh kapal perikanan Indonesia (KII) maupun oleh kapal perikanan asing (KIA) sehingga menyebabkan kerugian baik dari aspek sosial, ekologi/lingkungan, maupun ekonomi.

Untuk menyikapi masalah tersebut, berbagai kebijakan telah dibuat oleh pemerintah dalam meningkatkan perekonomian kelautan Indonesia, seperti melalui moratorium perizinan bagi kapal asing untuk memiliki izin di Indonesia, penenggelaman kapal illegal, pelarangan bongkar muat kapal di laut, larangan penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan, memberikan bantuan kapal ikan, sampai pemberian premi asuransi bagi nelayan, perlu dievaluasi kembali kemanfaatannya bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan kesejahteraan masyarakat nelayan. Kebijakan seperti pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang, misalnya, perlu dipikirkan kembali karena dianggap tidak mendukung peningkatan kesejahteraan nelayan.

Permasalahan penguatan kelembagaan di bidang kelautan masih belum menunjukkan adanya sinergi antara pusat dan daerah. Beban kerja dengan sumber daya manusia yang mendapat tugas untuk melakukan pengelolaan sumber daya laut ini menjadi terlalu berat seiring dengan banyaknya perubahan atau penguatan kebijakan kelautan ini. Pemerintah juga harus dapat menetapkan kebijakan dalam penerapan zona larangan penangkapan ikan agar nelayan dapat dengan mudah melakukan penangkapan ikan sehingga dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Oleh karena itu, hal utama yang perlu pemerintah lakukan adalah melakukan peninjauan ulang atas beberapa kebijakan kelautan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat nelayan.

Sinkronisasi kebijakan juga perlu dilakukan pemerintah, baik antar pemerintah pusat maupun antara pemerintah pusat dengan daerah dan swasta, dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi

kelautan Indonesia. Sinergi juga diperlukan antar kementerian dan lembaga dalam menetapkan kebijakan sehingga permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi kelautan di Indonesia dapat segera terselesaikan.

### **III. Redesain Pembangunan Ekonomi Kelautan**

Perhatian pembangunan ekonomi kini dan ke depan sudah waktunya diarahkan secara serius pada pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Hal ini karena sumber daya kelautan dan perikanan dapat menjadi salah satu motor penggerak dalam pembangunan perekonomian nasional. Namun pembangunan tersebut tidak boleh mengabaikan pengelolaan berbasis ekosistem. Pembangunan tersebut juga harus ditujukan untuk peningkatan dan penguatan peranan sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan serta membangkitkan wawasan, budaya bahari dan kekuatan pertahanan kedaulatan sebagaimana sejarah membuktikannya bahwa penguasaan laut sangat menentukan kekuatan pertahanan dan keamanan suatu negara (*who command the sea, command the world*).

Upaya redesign dan revitalisasi pembangunan ekonomi kelautan perlu difokuskan pada pembangunan ekonomi kelautan dalam aspek regulasi, ketatalaksanaan, kelembagaan, infrastruktur, SDM maritim dan pembiayaan. Melalui kekuatan penganggaran, penguasaan sumber daya dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan patroli keamanan maka pengelolaan potensi laut dan pengamanan wilayah perairan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan berhasil guna menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Indonesia sebagai poros maritim hanya akan tercapai jika semua elemen bangsa dapat bekerja sama menyelamatkan sektor kelautan dan membangun potensi maritim. Upaya tersebut harus dilakukan simultan dalam berbagai aspek baik tataran kebijakan maupun implementasi, serta melibatkan pemerintah pusat dan daerah secara intensif. Mulai dari memilih prioritas area perbaikan, pembangunan dan pengembangan yang lebih tepat. Apabila pemerintah mampu mendayagunakan potensi ekonomi kelautan, maka sektor ini tidak hanya mampu mengeluarkan bangsa dari persoalan utang luar negeri, kemiskinan dan pengangguran, juga dapat menghantarkan Indonesia menjadi bangsa yang maju, adil, makmur, dan bermartabat

#### **IV. Permasalahan Ekonomi Nelayan dan Upaya Pemberdayaannya**

Nelayan masih merupakan kelompok masyarakat yang memiliki kesejahteraan rendah. Dengan demikian sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi tumpuan sumber kehidupan mereka disatu sisi dan peningkatan sumber penerimaan perekonomian daerah dan nasional di masa yang akan datang. Oleh karena itu, berbagai peluang dan tantangan yang ada harus dapat disikapi dan dimanfaatkan secara nyata, optimal, dan berkelanjutan. Upaya peningkatan kesejahteraan nelayan ini dapat dilakukan melalui perbaikan kebijakan dan program penangkapan ikan, pengolahan ikan, dan usaha agribisnis perikanan tawar, laut dan payau. Kebijakan ini mutlak diperlukan karena lebih dari dua pertiga bagian Indonesia adalah wilayah perairan, sehingga memungkinkan untuk dapat memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan bagi pembangunan ekonomi nasional.

Arah kebijakan dalam meningkatkan kualitas kehidupan nelayan salah satunya dapat dilakukan dengan mengurangi dan

bahkan menghilangkan kendala yang dihadapi nelayan dalam kegiatan usahanya. Kendala dimaksud yakni antara lain meliputi terbatasnya akses permodalan, pengetahuan dan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi untuk mendorong produktivitas dan meningkatkan hasil tangkapan ikan. Dari berbagai kebijakan yang perlu dilakukan kebijakan peningkatan fasilitas akses permodalan serta keterampilan nelayan dan keluarganya merupakan salah satu kebijakan yang mutlak diperlukan. Dengan adanya kebijakan peningkatan permodalan dan keterampilan, nelayan dapat diharapkan mampu meningkatkan kapasitas usahanya secara lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, pendapatan keluarga nelayan akan meningkat sehingga kebutuhan dasar nelayan beserta anggota keluarga, khususnya pendidikan anak dan kesehatan seluruh anggota keluarga dapat terpenuhi.

## **V. Kebijakan Pemberantasan *Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing***

Kebijakan pemberantasan *Illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing* perlu terus dilanjutkan walaupun diakui kebijakan seperti ini dipastikan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Oleh karena itu, sebelum kebijakan pemerintah seperti ini dikeluarkan, maka pengakajian secara empiric terkait sisi positif dan negatif dari kebijakan seperti ini mutlak perlu dilakukan.

Dalam mengatasi *illegal fishing*, strategi yang dapat dilakukan yakni melalui strategi ke dalam dan ke luar. Strategi ke dalam di antaranya penyempurnaan sistem dan mekanisme perizinan perikanan tangkap, penegakan hukum di laut, pembenahan sistem hukum dan peradilan perikanan, dan pembenahan armada perikanan tangkap nasional. Strategi ke luar di antaranya meminta negara lain

untuk memberlakukan sanksi bagi kapal yang menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia dan bergabungnya Indonesia ke dalam organisasi perikanan internasional. Demikian pula, yang tidak boleh dikesampingkan yakni harmonisasi antara pemerintah dengan para *stakeholdernya*. Hal ini agar dukungan dan kerja sama pemerintah dengan *stakeholders* dalam mengatasi *IUU fishing* dapat berjalan efektif dan memberikan keuntungan dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional berkualitas dan berkelanjutan.

## **VI. Ekonomi Biru Sebagai Alternatif Kebijakan Ekonomi Kelautan**

Konsep ekonomi biru dapat menjadi alternatif dalam pembangunan kelautan dan perikanan kini dan ke depan. Hal ini antara lain karena konsep ekonomi biru mengedepankan aspek berkelanjutan dan inovasi dalam skala kecil dengan pelibatan langsung masyarakat. Dengan adanya inovasi-inovasi tersebut memungkinkan pembukaan lapangan kerja dan pengembangan ekonomi dalam skala yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Diakui, pemerintah telah mulai mengimplementasikan konsep kebijakan tersebut, di antaranya adalah dengan penerapan Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang kemudian diperkuat dengan berbagai peraturannya di bawahnya. Indonesia juga telah aktif terlibat dalam forum ekonomi keberlanjutan di dunia internasional. Selanjutnya agar konsep ini dapat lebih diserap masyarakat secara luas, pelibatan masyarakat secara langsung menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menerapkan konsep tersebut.

Tentu masih banyak lagi kebijakan-kebijakan kelautan dan perikanan yang perlu mendapat perbaikan dan penyesuaian terhadap kondisi dinamis, ketidakpastian dan risiko yang terjadi belakangan ini.



Satu hal yang harus dicatat bahwa apapun kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yang akan ditetapkan dan dilakukan ke depan, perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas dan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan mutlak harus diperhatikan. Jika tidak, keinginan Indonesia untuk keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah dan menjadi negara 5 besar maju di dunia pada tahun 2045 merupakan mimpi belaka.



# INDEKS

## A

aktivitas ekonomi, 44, 47, 57, 68,  
151  
alat tangkap, 16, 30, 31, 36, 44, 90,  
114, 120, 121, 126, 166  
APBN, 45, 51  
ASEAN, 153  
asuransi, 30, 36, 97, 102

## B

Batas Maritim, 8, 16  
bongkar muat, 36, 166  
bonus demografi, 50  
Budaya Bahari, 8, 167  
business as usual, 3, 61, 140

## C

cantrang, 8, 16, 30, 31, 36, 121, 139,  
166  
*Commercial Fishermen*, 90

## D

daring, 45  
DEKIN, 5, 53, 54, 62, 72  
*Destructive Fishing*, 114  
Dewan Kelautan Nasional, 53

diplomasi maritim, 8, 16, 28, 30  
diversifikasi pekerjaan, 101

## E

ekonomi, 3, 5  
berkelanjutan, 142, 157  
dualistik, 10, 88, 139  
masyarakat pesisir, 1031  
nasional, 3, 6, 43, 72, 168  
nelayan, 9, 85, 89, 93, 96, 101,  
121, 168  
pesisir, 6, 45, 47, 66, 68  
pertumbuhan, 55, 74, 115, 133,  
140  
Ekonomi Biru, 10, 133, 134, 135,  
145, 146, 147, 148, 150, 151,  
155  
Ekonomi Hijau, 10, 133, 134, 142,  
143, 145, 146  
Ekonomi Kelautan, 45, 46, 47, 49, 51,  
52, 55, 58, 59, 66, 69, 70, 72, 76,  
78, 97, 131, 135, 139, 150  
Ekonomi Sirkular, 10, 133, 142, 143  
ekosistem, 35, 46, 87, 93, 113, 121,  
151  
ekspor, 28, 88, 99, 119, 120  
*e-Logbook*, 45  
empirik, 3, 11  
*e-Perijinan*, 45

e-Service, 45

## F

*feasible*, 67

*Fishing Ground* , 114, 123

## G

Gas Rumah Kaca, 144

geoekonomi, 48, 55, 62

geopolitik, 48, 55, 62

geostrategis, 48, 49, 55, 62

Gunter Pauli, 134, 146

## I

ikan, 5, 10, 15, 17, 19, 20, 24, 26,  
28, 30, 36, 44, 68, 88, 102, 110,  
116, 118, 120, 122, 139, 152

*illegal*, 10, 24, 36, 46, 95, 111, 119,  
129, 139, 166, 169

*illegal fishing*, 10, 20, 23, 29, 30, 35,  
76, 79, 111, 112, 114, 125, 127,  
169

*impact*, 4, 165

industri Maritim, 8, 16

Industri Sumber Daya Alam Dan Jasa  
Kelautan, 8, 16

Industrial Fishermen, 90

infrastruktur maritim, 51, 56, 57

inovasi, 23, 56, 66, 134, 147, 155,  
157

investasi, 57, 133, 134, 145, 149, 157

*IUU Fishing*, 10, 25, 29, 45, 111, 112,  
113, 115, 116, 121, 123, 141,  
169

## J

jalur perdagangan, 18

## K

Kapal Perikanan Asing (KIA), 36,  
141, 166

Kapal Perikanan Indonesia (KII) , 36,  
141, 166

keberlanjutan, 25, 29, 100, 137, 139,  
144, 147, 151, 154, 158, 164

kebijakan, 3, 6, 7, 9, 15, 21, 22, 30,  
33, 37, 43, 58, 98, 115, 135

ekonomi kelautan, 7, 97, 131,  
170

*illegal fishing*, 125

kelautan, 15, 16, 17, 21, 23, 28,  
35, 36, 96, 165

kelautan dan perikanan, 4, 27  
pemberantasan IUU fishing, 112  
publik, 25, 53

Kekakuan Aset Perikanan (*Fixity And  
Rigidity Of Fishing Assets*), 91

kelautan, 5, 9, 11, 15, 17, 21, 23, 28,  
35, 43, 46, 47, 49, 58, 68, 74, 88,  
97, 109, 133, 135, 139, 140

kelembagaan, 36, 52, 56, 62, 72, 78,  
166

kepulauan, 27, 43, 61, 70, 78, 87,  
109, 133, 135, 150

kesejahteraan nelayan, 10, 27, 33,  
89, 95, 98, 112, 121

kewirausahaan, 135, 146

Koalisi Rakyat untuk Keadilan  
Perikanan (Kiara), 28, 111

Kelautan dan Perikanan (KKP), 44,  
47

Koalisi Rakyat Untuk Keadilan

Perikanan (KRKP), 111  
Komite Nelayan Tradisional  
Indonesia (KNTI), 111  
konektivitas laut, 8, 16

## L

sumber daya laut, 15, 20, 28, 36, 46,  
47, 133, 138, 145, 150  
limbah, 23, 59, 139, 143, 147, 151,  
155  
*limited resources*, 3

## M

maritim, 5, 9, 15, 18, 20, 26, 29, 43,  
52, 55, 74, 79, 87, 96, 150, 168  
infrastruktur, 51, 56, 57  
masyarakat, 10, 11, 20, 29, 52, 111,  
124, 134, 142, 149, 157, 165  
internasional, 43  
nelayan, 16, 17, 23, 29, 36, 93,  
94, 98, 100, 101, 123  
pesisir, 10, 29, 35, 66, 88, 101,  
139  
migrasi, 102  
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA),  
18  
MCS (*Monitoring, Control And  
Survey*), 124  
moratorium kapal eks asing, 27, 116  
moratorium perizinan, 36, 116

## N

nelayan, 4, 9, 11, 16, 20, 26, 29, 31,

33, 36, 46, 66, 75, 89, 90, 92, 93,  
94, 95, 97, 99, 102, 139, 158  
kemiskinan, 91, 92, 96, 101  
miskin, 92, 101  
Nilai Tukar Nelayan, 27, 29, 99

## O

Organisation of Economic Co-  
operation and Development  
(OECD), 142  
*online*, 45  
*opportunity cost*, 91  
*output*, 4, 8, 165  
*over fishing*, 4, 68

## P

pantai, 5, 18, 43, 50, 77, 87, 119,  
139, 158  
partisipasi, 66, 149  
pelibatan masyarakat, 11, 134, 158  
pembangunan, 7, 9, 15, 20, 26, 46,  
75, 93, 99, 142  
ekonomi, 9, 167  
ekonomi kelautan, 8, 34, 36, 41,  
55, 69, 70, 76, 165  
industri perikanan, 35  
infrastruktur maritim, 57  
kelautan, 10, 26, 55  
kelautan dan perikanan, 7, 11,  
26  
nasional, 79  
sumber daya manusia, 26, 97  
tol laut, 9, 46, 74  
pemberdayaan, 46, 78, 89, 101  
pembiayaan, 66, 70, 75, 78, 167

## Indeks

- pembiayaan mikro, 66  
pembudidaya ikan, 88, 96, 139, 157  
Penanaman Modal Asing (PMA), 62  
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), 62  
peneggelaman kapal asing, 29, 30, 122  
penerimaan ekonomi kelautan, 9, 46, 58  
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), 44, 53, 119  
penyuluh, 67, 97  
perekonomian, 3, 5, 9, 20, 35, 43, 46, 78, 99, 133, 135, 136, 139, 140, 142, 143, 147, 166  
*performance*, 4, 165  
perikanan, 5, 6, 18, 25, 35, 44, 46, 47, 50, 58, 61, 68, 78, 87, 93, 96, 99, 110, 113, 115, 118, 120, 124, 126, 138  
perikanan budidaya, 48, 50, 58, 63, 65, 75, 96, 110  
perikanan tangkap, 5, 19, 20, 44, 48, 52, 65, 87, 93, 96, 111, 125  
perlindungan, 20, 28, 59, 97  
pesisir, 10, 19, 23, 35, 47, 62, 66, 77, 101, 135  
polusi, 49, 141, 146, 154, 46, 48  
Poros Maritim Dunia, 5, 9, 15, 28, 43, 66, 78, 150  
posisi strategis, 15, 18  
*Post-Peasant Fishermen*, 90  
Produk Domestik Bruto (PDB), 6, 28, 45, 51, 58, 88, 110, 136, 139  
Program Jaminan Sosial, 98
- R**  
redesain, 8, 9, 41, 69, 70, 72, 76, 78,
- 167  
regulasi, 56, 58, 65, 70, 71, 167  
revitalisasi, 8, 69, 167  
riset kelautan, 72, 79  
ruang laut, 8, 53, 72
- S**  
sinergis, 9, 43, 53  
Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), 30, 32, 114  
Sistem Informasi Geografis (SIG), 124  
smart Port, 57  
stok ikan, 29, 139  
sumber daya, 3, 8, 19, 25, 43  
sumber daya kelautan,  
sumber daya manusia, 9, 28, 36, 45, 70, 81, 96, 105, 113, 173  
Surat Ijin Melaut, 34, 36  
Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI), 116  
Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), 116
- T**  
Tempat Pelelangan Ikan (TPI), 44, 87, 98  
tipologi nelayan, 89, 92  
tol laut, 26, 44, 50, 74  
*transmitter*, 114
- U**  
*Underfishing*, 4, 76, 79  
United Nations of Environment

Program (UNEP), 134  
*Unlimited Wants And Needs*, 3  
*Unregulated Fishing*, 10, 24, 46, 113,  
126  
*Updating*, 7

**V**

VMS (*Vessel Monitoring Systems*),  
124

**W**

Wilayah Pengelolaan Perikanan  
Negara Republik Indonesia  
(WPPNRI), 26, 36, 141  
wisata bahari, 47, 50

**Z**

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia  
(ZEEI), 18, 19, 76, 87, 122





## TENTANG EDITOR

**Prof. Carunia Mulya Firdausy, MADE, Ph. D., APU.** adalah Profesor Riset Bidang Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI) dan Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Tarumanagara (UNTAR). Lahir di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1957. Gelar Sarjana diperoleh dari Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1981. Kemudian melanjutkan ke jenjang *Master Degree di bidang Agricultural Development Economics (MADE)* dari *Australian National University, Canberra, Australia* pada tahun 1986. Kemudian meraih Ph.D bidang Ilmu Ekonomi dari *University of Queensland, St. Lucia, Brisbane-Australia* pada tahun 1992. Tahun 1995-1996, menjadi Staf Ahli Khusus Menteri Sekretaris Negara dalam pembuatan materi Pidato Presiden RI bidang Ekonomi. Kemudian tahun 1997-2001 menjadi Kepala Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI. Tahun 2001-2002 menjadi Staf Ahli bidang Ekonomi, Dewan Ketahanan Nasional. Tahun 2005-2010 menjadi Deputy Menteri Riset dan Teknologi (Ristek) pada Bidang Dinamika Masyarakat dan *President of Non-Align Movement for Science and Technology (NAM)*, serta *Chairman of ASEAN Committee on Science and Technology (ASEAN-COST)*.

Pengabdianya dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ekonomi mencakup antara lain: (a) penelitian dalam bidang ekonomi pembangunan, makro ekonomi dan ekonomi internasional



Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI); (b) Konsultan penelitian *Asian Development Bank (ADB)*, *United Nation for Economic and Social for Asia and Pacific (UN-ESCAP)*, *International Labour Organization (ILO)*, UNDP, UNCTAD, UNSFIR, ISEAS, ISIS dan *World Bank*; (c) Dosen dan pembimbing mahasiswa program S1, S2, dan S3, untuk mahasiswa di beberapa Universitas seperti UI, IPB, UNPAD, dan UNTAR; (d) Mitra Bestari Buletin Ilmiah Perdagangan, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Sekretariat Jenderal DPR-RI dan Jurnal Standarisasi, BSN; (e) Redaktur Jurnal Ekonomi UNTAR dan Jurnal Ekonomi dan Pembangunan LIPI; (f) sejak tahun 2008 menjadi *Editorial Member of Journal of Social and Economic Science*, *International Journal of Development Research and Quantitative Techniques* dan *International Journal of Economics and Business Studies*, New York, USA; (g) Editor dari berbagai Jurnal Ekonomi; (h) Penyunting dari berbagai buku dan prosiding bertemakan ekonomi; dan (i) *Coordinator East Asian Development Network (EADN)* untuk Indonesia dan anggota *Think Tank Asian Development Bank (ADB)* sejak tahun 2010. Berbagai karya ilmiah baik dalam bentuk jurnal telah diterbitkan antara lain dalam *Review of Asian Development Bank (ADB)*, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, *Institute for Southeast Asian Studies (ISEAS)*, ILO dan UN ESCAP. Demikian pula dengan buku hasil penelitian yang diterbitkan oleh UN ESCAP, ILO, UNSFIR, UNDP dan ADB serta penerbit internasional lainnya. Alamat email yang dapat dihubungi adalah [cmfirdausy@gmail.com](mailto:cmfirdausy@gmail.com) dan [carunia\\_firdausy@yahoo.com](mailto:carunia_firdausy@yahoo.com).

## TENTANG PENULIS

**Achmad Sani Alhusain, SE.,MA.**, Lahir di Cimahi, 11 Mei 1972. Menyelesaikan Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen, Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung, tahun 1998. Menyelesaikan *Master of Art in Economic Policy* di *Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University, Atlanta, USA*, 2002. Penulis merupakan Peneliti Madya Golongan IV/a dengan bidang kepakaran Kebijakan Publik pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Tulisan yang sudah diterbitkan antara lain berjudul: Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kreatif, Kebijakan Pemerataan Pembangunan Daerah di Indonesia, dan Upah Minimum: Kebijakan, Permasalahan dan Solusi. Penulis juga aktif melakukan berbagai penelitian, pengkajian, dan analisa yang berhubungan dengan isu-isu kebijakan publik serta memberikan pendampingan pada Alat Kelengkapan Dewan dan dalam proses pembentukan Undang-undang yang sesuai dengan bidang kepakaran. Email: sani\_alhusain@yahoo.com.

**Dr. Ariesy Tri Mauleny, S.Si.,M.E.**, Lahir di Palembang, 26 Maret 1975. Menyelesaikan Program Doktor Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (2019), Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, kekhususan Keuangan Pusat dan Daerah, FEB Universitas Indonesia (2007) dan Sarjana Sains di FMIPA Universitas Indonesia (1997). Berkarir sebagai Peneliti Muda bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dengan Kepakaran Kebijakan Ekonomi. Penulis pernah mendampingi Pansus Non RUU DPR RI untuk Pemindahan Ibu Kota Negara (2019),

Komisi XI untuk RUU PNPB (2016), BALEG untuk harmonisasi dan pembahasan RUU Penjaminan (2015) serta Pansus RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (2014). Beberapa karya tulis ilmiah yang sudah dipublikasikan antara lain: Koperasi dalam Sistem Perekonomian Indonesia (2018), Analisis Empiris Koperasi Indonesia (2018), Pemberdayaan UMKM dan Perekonomian Nasional: Perspektif Penjaminan (2017), Pemangkasan Anggaran 2016 dan Target Pertumbuhan Ekonomi (2016), Kebijakan PMN dalam Mendukung Perekonomian Nasional (2015), serta Aglomerasi, Perubahan Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan Jakarta (2015), Peranan Dana Perimbangan terhadap Sektor Kesehatan (2014), dan Eksistensi Keuangan Negara Menuju Kemandirian Pembangunan di Era Otonomi Daerah (2013). Penulis dapat dihubungi melalui email: [ariesy.t.leny@gmail.com](mailto:ariesy.t.leny@gmail.com).

***Nidya Waras Sayekti, S.E.,MM.***, lahir di Jakarta 3 Juli 1978, menyelesaikan pendidikan D3 di Politeknik Universitas Indonesia Jurusan Perbankan, S1 di Universitas Mercu Buana Jurusan Manajemen, dan S2 Magister Manajemen di universitas yang sama. Penulis mulai berkarir sebagai Peneliti Muda Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI sejak tahun 2010 hingga sekarang. Penulis telah menghasilkan beberapa karya ilmiah yang dimuat dalam bentuk Info Singkat, Jurnal, dan Bagian Buku, antara lain: Kebijakan Utang Luar Negeri Indonesia Dari lembaga Keuangan Global (2015), RAPBN-P Tahun 2014 Minim Fungsi Stimulus (2014), Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan (2014), Kebijakan Penetapan Upah Minimum di Provinsi Maluku Utara (2014), dan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air: Peran PJT I dalam Menjaga Ketahanan Air dan Pangan di Provinsi Jawa Timur (2013). Penulis dapat dihubungi melalui email: [nidya\\_ws@yahoo.com](mailto:nidya_ws@yahoo.com).

***Lisnawati, S.Si.,M.SE.***, adalah Peneliti Muda dengan kepakaran Ekonomi Terapan. Lahir di Jakarta, 8 September 1982. Pendidikan

### *Tentang Penulis*

S1 Sarjana Sains diselesaikan di FMIPA Universitas Indonesia pada tahun 2005. Pendidikan S2 Ilmu Ekonomi diselesaikan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada Tahun 2008. Bekerja sebagai Peneliti bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Badan Keahlian DPR RI. Penulis pernah mendampingi Komisi VI untuk pembahasan RUU Perdagangan (2014) dan RUU Koperasi (2012) serta Komisi XI untuk pembahasan RUU *Tax Amnesty* (2016). Penulis juga telah menghasilkan beberapa karya ilmiah yang dimuat dalam bentuk Info Singkat, Jurnal, dan Bagian Buku, antara lain: Implementasi Sistem Keuangan Pusat dan Daerah dalam Mendukung Perekonomian Nasional (2015), Kebijakan Ketenagakerjaan (2014). Penulis juga terlibat dalam penelitian kelompok di antaranya dengan topik: PAD (2016), Konektivitas (2015), dan Evaluasi Pembangunan Daerah (2014). Penulis dapat dihubungi melalui email: lisnawati.dpr@gmail.com.

***Masyithah Aulia Adhiem, S.Si., M.E.,*** lahir di Surabaya, 3 Juni 1983. Menyelesaikan Sarjana Sains dari Fakultas MIPA Universitas Indonesia pada tahun 2006 dan Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia pada tahun 2009. Saat ini merupakan Peneliti Pertama pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dengan bidang peminatan kebijakan ekonomi. Beberapa tulisan yang pernah dihasilkan di antaranya adalah Kebijakan Impor Gula: Potensi Dampak dan Upaya Pengamanan Stok Nasional (Info Singkat 2018) dan Optimalisasi Pengelolaan Dana Desa untuk Pengentasan Kemiskinan (Info Singkat 2019). Penulis dapat dihubungi melalui email: masyithah.adhiem@dpr.go.id.

